



Ketimpangan dan Prospek Perekonomian di Pulau Sumatera

Anna Yulianita^{1✉}, Dede Mardhian², Mukhlis³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan

annayulia@unsri.ac.id

Abstract

Sumatra Island is the third largest island in Indonesia which has extraordinary natural resource potential. Sumatra Island has 10 provinces which are the islands with the most provinces in Indonesia. Each province has different resources and geographical conditions so that inequality occurs with an uneven economy. This study aims to identify leading sectors and prospective sectors in each province in Sumatra. The analysis was carried out on economic inequality between provinces in Sumatra. This study uses the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) and Williamson Index (WI) approaches. The results showed that 10 provinces in the Sumatra region had 1 province experiencing high category inequality, 4 provinces experiencing medium category inequality, and 5 provinces experiencing low category inequality. In the LQ analysis it is known that the leading sector for the province in the Sumatra region is the agricultural sector; Forestry and Fisheries; Water Procurement; Waste disposal; Waste Management; Waste and Remediation; and Mining and Quarrying Sector. In the DLQ analysis it is known that each economic sector has prospects for development in the future. The sectors to be developed are Electricity and Gas Procurement; Wholesale and Retail Trade; and Car and Motorcycle Workshop. So that this research can be used as material for consideration and reference for local governments in making policies and synergizing in development in Sumatra.

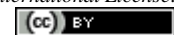
Keywords: Inequality and Prospects, Economic Base, Dynamic Location Quotient (DLQ), Location Quotient (LQ), Williamson Index (IW).

Abstrak

Pulau Sumatera adalah pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi yang merupakan pulau dengan provinsi terbanyak di Indonesia. Setiap propinsi memiliki sumber daya dan kondisi geografis yang berbeda sehingga terjadinya ketimpangan dengan tidak meratanya perekonomian. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor prospektif di setiap provinsi di Sumatera. Analisis dilakukan terhadap ketimpangan perekonomian antar provinsi di Sumatera. Penelitian ini menggunakan pendekatan Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Williamson Index (WI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 provinsi di wilayah Sumatera terdapat 1 provinsi mengalami ketimpangan kategori tinggi, 4 provinsi mengalami ketimpangan kategori sedang, dan 5 provinsi mengalami ketimpangan kategori rendah. Pada analisis LQ diketahui bahwa *leading sector* untuk provinsi di wilayah Sumatera adalah sektor Pertanian; Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air; Pembuangan Limbah; Pengelolaan Limbah; Limbah dan Remediasi; dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada analisis DLQ diketahui bahwa masing-masing sektor ekonomi memiliki prospek untuk dikembangkan di masa mendatang. Sektor yang dikembangkan adalah Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Bengkel Mobil dan Motor. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bersinergi dalam pembangunan di Sumatera.

Kata kunci: Ketimpangan dan Prospek, Basis Ekonomi, Dynamic Location Quotient (DLQ), Location Quotient (LQ), Indeks Williamson (IW).

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pulau ini terdiri dari 10 provinsi sehingga menjadikan Pulau Sumatera sebagai pulau dengan provinsi terbanyak. Kesepuluh provinsi tersebut memiliki kondisi geografis dan sumber daya yang berbeda-beda yang berdampak pada perbedaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di setiap provinsi. Potensi sumber daya dan kondisi geografis yang berbeda di setiap daerah menjadi dasar terjadinya ketimpangan. Akibatnya, kemampuan suatu daerah untuk melakukan proses pembangunan juga berbeda,

hal ini dapat membuat garis keturunan dimana terdapat daerah maju dan daerah tertinggal. Adanya disparitas antar wilayah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Aspek ketimpangan pembangunan antar daerah juga memiliki keterkaitan dengan rumusan dalam kebijakan pembangunan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah [1].

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan desentralisasi fiskal karena masing-

masing daerah yang mengetahui karakteristiknya. Daerah yang terbaik dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Otonomi daerah dengan memberdayakan potensi dapat berhasil apabila sektor unggulan daerah dapat dioptimalkan [2]. Sektor unggulan tersebut penting untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengurangi ketimpangan. Desentralisasi fiskal dapat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan [3]. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah [4], [5]. Hubungan negatif berdampak pada penurunan pendapatan nasional.

Kondisi daerah yang bervariasi dalam sektor sosial ekonomi pada keterbatasan infrastruktur, kepadatan penduduk, dan pengangguran memiliki peran penting dalam program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Peran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam dana desa sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Transfer dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk miskin di Indonesia [6].

Ketimpangan merupakan fenomena yang terjadi dalam perekonomian nasional dimana terdapat perbedaan atau kesenjangan antara setiap anggota masyarakat dalam kegiatan ekonomi, termasuk perbedaan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya [7]. Ketimpangan pada disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat di setiap daerah. Akibat dari perbedaan dalam kemampuan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan juga berbeda. Berdasarkan penelitian yang ada bahwa terdapat pengaruh sumber daya alam terhadap ketimpangan. Keadaan ini disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang tersedia di setiap daerah [8], [9]. Hasil sebaliknya menunjukkan suatu perbedaan yang mencolok dimana dijelaskan bahwa sumber daya alam minyak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek [10]. Sumber daya batubara tidak merata dan mengakibatkan ketimpangan yang signifikan di berbagai daerah [11], [12].

Terdapat 5 provinsi di Sumatera yang memiliki indeks ketimpangan lebih besar dari rata-rata yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau propinsi. Studi ini didukung oleh [13]. Provinsi Sumatera Barat dan Bangka Belitung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan kategori ketimpangan tinggi terdapat pada provinsi Jambi dan Kepulauan Riau [14], [15], [16], [12], [17].

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi kegiatan nasional dan kegiatan non basis dan hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi [18]. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor atau

subsektor ekonomi tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Teknik LQ dapat dibagi menjadi dua yaitu Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) [19]. Analisis LQ dan DLQ dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; bidang administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, bidang pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial dapat membantu pembangunan [20]. Analisis LQ di Wilayah Regional Sumatera menyimpulkan bahwa secara umum memiliki keunggulan pada sektor pertanian dan sektor pertambangan [16]. Hampir seluruh provinsi di Sumatera memiliki keunggulan komparatif di bidang pertanian [21], [22]. Sektor perikanan merupakan basis unggulan bagi prospek perekonomian daerah [23] dan sektor Pertanian dan Kehutanan termasuk sektor yang dapat diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi yang dipengerahui oleh lokasi [24].

Pulau Sumatera memiliki kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua di Indonesia yaitu sebesar 21,4 persen setelah Pulau Jawa sebesar 59,3 persen [25]. Pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis sektor apa saja yang menjadi unggulan dan ketimpangan yang memiliki prospek ekonomi yang dapat dikembangkan di setiap provinsi di wilayah Sumatera. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bersinergi dalam pembangunan di Sumatera.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengukur seberapa besar tingkat ketimpangan di 10 provinsi di Pulau Sumatera dalam mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor prospektif di masing-masing provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Indeks Williamson (IW), LQ, dan DLQ periode 2013-2020. IW digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah melalui pendekatan jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Formula yang digunakan adalah menjumlahkan selisih PDRB per kapita suatu daerah dengan daerah yang lebih tinggi tingkatannya [26]. Perbandingan dilakukan pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, kabupaten/kota dan provinsi serta menimbang proporsinya penduduk suatu daerah. [27]. Dalam penentuan nilai IW dan menentukan kriteria dengan angka Indeks 0 (nol) yang berarti tidak ada ketimpangan ekonomi. Indeks lebih dari nol menunjukkan terjadi ketimpangan antar daerah atau kota. Semakin besar angka indeks berarti semakin besar ketimpangan ekonomi antar daerah atau kota. Indeks ini membantu dalam mengetahui dan menjelaskan kondisi ketimpangan pendapatan menggunakan analisis IW.

Analisis LQ bertujuan untuk menentukan sektor unggulan di suatu daerah dengan cara membandingkan besar kecilnya peran suatu sektor di suatu daerah dengan peran sektor tersebut secara nasional, dengan

kata lain membandingkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan negara. LQ adalah perbandingan peran sektor atau industri di kabupaten atau kota terhadap peran sektor atau industri di provinsi. Cara mengukur LQ melalui nilai tambah atau PDRB dan pendekatan tenaga kerja [28]. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jenis sektor basis dan non basis. Perhitungan ini diperoleh nilai klasifikasi untuk menentukan sektor yang menjadi unggulan [29], [14]. Deskripsi nilai LG terdiri atas:

- Jika nilai LQ besar dari 1 maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor potensial (basis).
- Jika nilai LQ < 1 maka sektor tersebut bukan merupakan sektor potensial (non basis).
- Jika LQ = 1 maka peminatan tingkat provinsi sama dengan tingkat nasional.

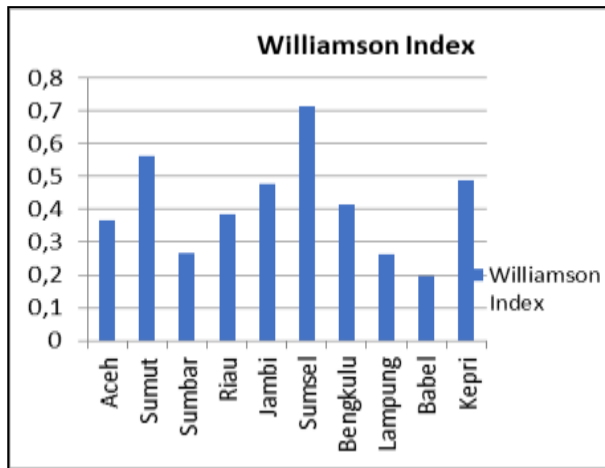
Analisis DLQ digunakan sebagai alternatif untuk melengkapi kelemahan analisis LQ. Metode ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor prioritas ke depan. Nilai DLQ adalah analisis yang dapat membantu mengetahui adanya perubahan atau reposisi sektoral [30]. DLQ bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat sektor yang semula merupakan sektor basis pada waktu tertentu dan berubah menjadi sektor non-basis atau sebaliknya. Awalnya sektor non-basis maka dapat berubah menjadi sektor basis. DLQ merupakan modifikasi bentuk SLQ dengan kombinasi besaran PDRB melalui nilai sektor dan subsektor produksi dari satu periode ke periode berikutnya. Hasil perhitungan DLQ terdapat kriteria:

- Jika nilai DLQ besar dari 1 maka laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB provinsi lebih cepat dari proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap laju pertumbuhan GNP Nasional.
- Jika nilai DLQ kecil dari 1 maka laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi lebih rendah dari proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap laju pertumbuhan GNP Nasional.
- Jika DLQ sama dengan 1 maka proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB provinsi sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap laju pertumbuhan GNP Nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Indeks Williamson (IW)

Ketimpangan wilayah menggambarkan perbedaan distribusi pendapatan masyarakat di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. Alat ukur ketimpangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah IW yang menggambarkan ketimpangan setiap provinsi di Pulau Sumatera dan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Rata-rata Ketimpangan Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013-2020

Gambar 1 menunjukkan Provinsi yang memiliki skor IW dalam kategori tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan skor IW sebesar 0,713. Kemudian provinsi yang memiliki rata-rata nilai ketimpangan kategori sedang antara lain Provinsi Sumatera Utara dengan nilai IW 0,560, Provinsi Kepulauan Riau yaitu 0,487, kemudian Provinsi Jambi dengan nilai 0,477 dan disusul Provinsi Bengkulu dengan rata-rata nilai ketimpangan sebesar 0,415. Sedangkan daerah dengan tingkat ketimpangan rata-rata rendah dimiliki oleh Provinsi Riau dengan nilai rata-rata 0,383, Provinsi Aceh dengan nilai IW 0,367, Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 0,265, Provinsi Lampung dengan nilai rata-rata 0,262 dan Bangka. Provinsi Belitung dengan nilai ketimpangan sebesar 0,195. Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansyur dan Utomo pada tahun 2021 dimana dalam kajian tahun 2005-2010 dengan menggunakan alat analisis IW, provinsi yang mengalami ketimpangan kategori tinggi adalah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau [16]. Kemudian provinsi yang mengalami ketimpangan kategori sedang adalah provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung, sedangkan provinsi yang mengalami ketimpangan kategori rendah adalah Provinsi Lampung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi et al pada tahun 2018, dimana pada tahun penelitian 2012-2016 dengan menggunakan alat analisis IW [16]. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat, Lampung dan Provinsi Bangka Belitung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kategori ketimpangan tinggi terdapat perbedaan, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau [13].

3.2. Location Quotient (LQ).



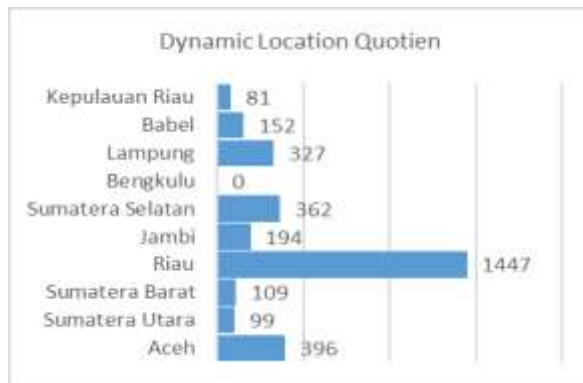
Gambar 2. Sektor Basis Ekonomi Propinsi di Wilayah Sumatera Berdasarkan Location Quotient

Pada Gambar 2 menunjukkan sektor ekonomi unggulan terlihat bahwa di Provinsi Aceh terdapat 7 sektor unggulan, yang terbesar adalah sektor pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai Location Quotient sebesar 2,48, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lampung masing-masing memiliki sektor unggulan dengan nilai Location Quotient tertinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, maka Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 sektor unggulan dan sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor unggulan.

Kemudian provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau memiliki sektor yang paling diunggulkan yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Kemudian Provinsi Bengkulu memiliki 9 sektor unggulan dengan sektor unggulan terbanyak adalah sektor penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, persampahan dan daur ulang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aji dan Nasriyah [14].

3.3. Dynamic Location Quotient (DLQ).

DLQ digunakan untuk mengetahui prospek sektor di suatu wilayah, apakah di masa mendatang sektor tertentu dapat bertahan sebagai sektor basis atau tidak dan sebaliknya. Hasil perhitungan DLQ untuk setiap provinsi di wilayah Sumatera disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Potensi Sektor Ekonomi di Wilayah Sumatera Berdasarkan Dynamic Location Quotient

Gambar 3 terlihat sektor yang paling dominan untuk dikembangkan ke depan dilihat dari nilai kontribusi DLQ-nya adalah sektor pertambangan dan penggalian, dimana sektor ini memiliki nilai DLQ tertinggi untuk

Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Riau. Kemudian sektor potensial dan nilai DLQ yang dominan adalah sektor pengadaan listrik dan gas dimana sektor ini memiliki nilai DLQ tertinggi dari Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu dan Bangka Belitung. Pada analisis DLQ diketahui bahwa masing-masing sektor ekonomi memiliki prospek untuk dikembangkan di masa mendatang provinsi di wilayah Sumatera adalah bidang pengadaan listrik dan gas dan sektor dari perdagangan grosir dan eceran; reparasi mobil dan motor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rini dan Khoirudin [30] [31].

Berdasarkan dari analisis terdapat:

- Provinsi Aceh Dalam analisis IW , Provinsi Aceh mengalami penurunan tingkat ketimpangan pembangunan pada tahun 2013-2018, namun terjadi sedikit peningkatan pada masa pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2019-2020. Nilai rata-rata ketimpangan di Provinsi Aceh tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai IW sebesar 0,367. Provinsi Aceh memiliki 5 sektor ekonomi unggulan serta prospek pengembangan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor real estate, sektor wajib pemerintahan dan pertahanan, jaminan sosial dan pelayanan kesehatan. dan bidang kegiatan sosial.
- Provinsi Sumatera Utara Dalam analisis IW , tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara berfluktuasi, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan nilai IW sebesar 0,560. Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 sektor ekonomi unggulan yang memiliki prospek pengembangan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor real estate.
- Provinsi Sumatera Barat Tingkat ketimpangan Provinsi Sumatera Barat memiliki kecenderungan yang terus meningkat, namun rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2020 berada pada kategori ketimpangan rendah dengan nilai IW sebesar 0,265. Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 sektor ekonomi unggulan serta prospek pengembangan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pertahanan wajib jaminan sosial serta sektor jasa pendidikan.
- Provinsi Riau, Provinsi Riau memiliki nilai ketimpangan yang selalu menurun, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Riau tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai IW sebesar 0,383. Terdapat 2 sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan prospek untuk dikembangkan oleh Provinsi Riau yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan.

- e. Provinsi Jambi dalam analisis IW mengalami penurunan tingkat ketimpangan pembangunan pada tahun 2013-2017, sedangkan nilai rata-rata ketimpangan di Provinsi Jambi pada tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan Nilai IW sebesar 0,477. Provinsi Jambi memiliki 4 sektor ekonomi unggulan yang memiliki prospek pengembangan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial.
- f. Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai ketimpangan yang fluktuatif, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi dengan nilai IW sebesar 0,713. Terdapat 2 sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan prospek untuk dikembangkan oleh Provinsi Sumatera Selatan yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor real estate.
- g. Tingkat ketimpangan Provinsi Bengkulu memiliki kecenderungan yang terus meningkat, namun rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan nilai IW sebesar 0,415. Provinsi Bengkulu memiliki 4 sektor ekonomi unggulan yang memiliki prospek pengembangan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor real estate serta sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pertahanan jaminan sosial wajib.
- h. Provinsi Lampung memiliki nilai ketimpangan yang cukup stabil, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Lampung tahun 2013-2020 berada pada kategori ketimpangan rendah dengan nilai IW sebesar 0,262. Terdapat 2 sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan prospek untuk dikembangkan oleh Provinsi Lampung yaitu sektor transportasi dan pergudangan serta sektor real estate.
- i. Tingkat ketimpangan di Provinsi Bangka Belitung memiliki kecenderungan yang terus meningkat, namun rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Bangka Belitung tahun 2013-2020 berada pada kategori ketimpangan rendah dengan nilai IW sebesar 0,195. Provinsi Bangka Belitung memiliki 4 sektor ekonomi unggulan dan prospek pengembangan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor real estate serta sektor jaminan sosial wajib administrasi pemerintahan dan pertahanan.
- j. Tingkat ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau selalu mengalami penurunan, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2020 berada pada kategori ketimpangan sedang dengan IW nilai 0,487. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 3 sektor ekonomi unggulan dan prospek pengembangan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 provinsi di wilayah Sumatera, 1 provinsi mengalami ketimpangan kategori tinggi, 4 provinsi mengalami ketimpangan kategori sedang dan 5 provinsi mengalami ketimpangan kategori rendah. Dalam analisis LQ diketahui bahwa sektor unggulan provinsi di wilayah Sumatera adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pembuangan Limbah, Pengelolaan Limbah dan Remediasi dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Kemudian dengan analisis DLQ diketahui bahwa sektor ekonomi memiliki prospek untuk dikembangkan di masa depan masing-masing provinsi di wilayah Sumatera adalah Bidang Pengadaan Listrik dan Gas dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Bengkel Mobil dan Motor.

Daftar Rujukan

- [1] Nurhemi, N., & R, G. S. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183–206. DOI: <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522> .
- [2] Handayani, S., & Nasution, A. (2022). Kluster Komoditi Unggulan Perkebunan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2). DOI: <https://doi.org/10.22373/jep.v13i2.767> .
- [3] Bojanic, A. N. (2018). The impact of fiscal decentralization on growth, inflation and inequality in the Americas. *CEPAL Review*, 2018(124), 57–77. DOI: <https://doi.org/10.18356/31c71be8-en> .
- [4] Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119. DOI: <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117> .
- [5] Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22. DOI: <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235> .
- [6] Kharisma, B., S. Remi, S., Syaiful, M., & Abdillah, R. (2020). The Impact of Local Governments' Social Transfers on Poverty Reduction In Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 330–340. DOI: <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8565> .
- [7] Ambarita, Y. M. R., & Sirait, T. (2020). Penerapan Model Gravitasi Data Panel: Kajian Perdagangan Internasional Indonesia ke Negara Anggota Asean. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 726–737. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.85> .
- [8] Yuliana, D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4098> .
- [9] Suryaningrum, D., & Muchtolifah, M. (2022). Analisis Potensi dan Disparitas Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten di Wilayah Jawa Timur Bagian Timur. *Journal of Economics Development Issues*, 5(1), 37–47. DOI: <https://doi.org/10.33005/jedi.v5i1.116> .
- [10] Effendy, C. A., & Djohan, S. (2022). Pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota.

- KINERJA, 18(4), 680–688. DOI: <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10558> .
- [11] Avom, D., Ntsame Ovono, N., & Ongo Nkoa, E. (2022). Revisiting the effects of natural resources on income inequality in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Development Issues*, 21(3), 389–412. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJDI-02-2022-0036> .
- [12] Ridho, M., Zulghani, Z., & Achmad, E. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 47–58. DOI: <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.14005> .
- [13] Andhiani, K. D., Erfit, E., & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34. DOI: <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4602> .
- [14] Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto, Kristina Bella, & Dwi Retno Ayu Novianti. (2022). Akselerasi Penerapan Digital Governance dalam Meningkatkan Resilience (Ketahanan) Masyarakat Desa di Era Covid-19 di Kecamatan Rengel, Tuban. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 6(2), 259–266. DOI: <https://doi.org/10.20473/jlm.v6i2.2022.259-266> .
- [15] Dersi Herka Mayu, Wijayanto, D., Mudzakir, A. K., & Kurniawan, K. (2021). Penentuan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(1), 47–58. DOI: <https://doi.org/10.29244/jmf.v12i1.33762> .
- [16] Mansyur, A. I., & Utomo, A. P. (2021). Penerapan Model Regresi Data Panel: Determinan PDRB Sektor Unggulan di Provinsi Riau Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 421–430. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.899> .
- [17] Saputra, P. A., Syahrial, S., & Dermawan, A. (2022). Komoditas Unggulan dan Daya Saing Sektor Pertanian di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 53–59. DOI: <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.692> .
- [18] West, G. P., Bamford, C. E., & Marsden, J. W. (2008). Contrasting entrepreneurial economic development in emerging latin american economies: Applications and extensions of resource-based theory. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 32(1), 15–36. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00214.x> .
- [19] Syukur, R., Patiung, M., & Hermawati, D. T. (2021). Analisis Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Sebagai Sektor Potensial yang Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 21(1). DOI: <https://doi.org/10.30742/jisa.21120211349> .
- [20] Karmini, K., Saroyo, S., Karyati, K., Widiati, K. Y., Widuri, N., & Sulichantini, E. D. (2022). Sektor Unggulan di Kabupaten Kutai Barat dan Kontribusinya dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Riset Pembangunan*, 5(1), 22–32. DOI: <https://doi.org/10.36087/jrp.v5i1.114> .
- [21] Saragih, J. R., Siburian, A., Harmain, U., & Purba, T. (2021). Komoditas Unggulan dan Potensial Sektor Pertanian Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 4(1), 51–62. DOI: <https://doi.org/10.37637/ab.v0i0.633> .
- [22] Darwanto, D., & Raharjo, S. T. (2018). Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkh) Sektor Pertanian Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 1(2), 27–36. DOI: <https://doi.org/10.31002/rn.v1i2.710> .
- [23] Tanjung, G. S., Pujiyanto, M. A., Farichah, L., & Anggraini, F. E. (2022). Potensi Sektor Pertanian dalam Prioritas Pembangunan Ekonomi Kabupaten Belitung. *Jurnal Pertanian Cemara*, 19(2), 110–123. DOI: <https://doi.org/10.24929/fp.v19i2.2244> .
- [24] Umasugi, L. (2019). Peranan Sektor Pertanian terhadap Perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *JURNAL BIOSAINSTEK*, 1(01), 10–15. DOI: <https://doi.org/10.52046/biosainstek.v1i01.207> .
- [25] Syakir, Y. (2017). Analisis usaha tani nanas di Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.22437/pim.v4i2.4165> .
- [26] Noviar, N. (2021). Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24–33. DOI: <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118> .
- [27] Yulhendri, Y., Melati, I. S., Marna, J. E., & Softazia, W. (2020). The Analysis of the Economic Inequality of the Coast Regions. *Economics Development Analysis Journal*, 9(1), 111–124. DOI: <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i1.35372> .
- [28] Hamdani, K. K., & Susanto, B. (2021). Identifikasi Komoditas Tanaman Pangan Unggulan di Kabupaten Indramayu Melalui Analisis LQ (Location Quotient). *J-Plantasimbiosa*, 3(1), 11–25. DOI: <https://doi.org/10.25181/jplantasimbiosa.v3i1.1955> .
- [29] Maulana, Y. S., Munawar, A. H., Hadiani, D., Ratningsih, & Wibisono, T. (2020). Location Quotient Analysis (LQ) in Determining the Excellent Commodity. *Atlantis Press*. DOI: <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.015> .
- [30] Firda Auliyah Anggraeni. (2022). Analisis Location Quotient dan Shift Share Di Kota Balikpapan Tahun 2015-2019. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 218–239. DOI: <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.715> .
- [31] Pinda rini, O. sari, & Khoirudin, R. (2020). Analisis Sektor-Sektor Ekonomi dengan Potensi Unggulan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 15–23. DOI: <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2790> .